

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan dan mengembangkan berbagai potensi daerah yang dimiliki guna kemajuan daerahnya masing-masing.

Mengenai otonomi Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B, dimana dalam pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan adanya otonomi, yaitu dengan mendekatkan pembuatan keputusan di daerah tersebut. Pemerintah pusat telah memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur segala urusan yang ada (Arifin, 2009). Penyelenggara pemerintah daerah sebagai sub sistem Negara dimaksudkan

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah untuk melayani masyarakat (Soelistiyo dan S. Hadi, 2016:62). Adanya kebijakan ini diharapkan daerah dapat mengalami pemberdayaan yang optimal sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memacu kemampuan kreativitas pemerintah daerah dalam menangani masalah dan potensi daerahnya sendiri untuk mencapai pembangunan daerahnya masing-masing.

Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh program pembangunan nasional adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperluas landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran itu, Propenas menggunakan sejumlah indikator yang mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bertahap, sehingga mencapai 6-7 persen, inflasi terkendali sekitar 3-5 persen, menurunkan tingkat pengangguran menjadi sekitar 5,1 persen, dan menurunnya jumlah penduduk miskin (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007).

Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya berfokus pada pengurangan kemiskinan ataupun terkait kesenjangan yang terjadi, pembangunan ekonomi saat ini juga memfokuskan pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang nantinya berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Di setiap proses perencanaan pembangunan sebuah daerah selalu ada strategi untuk

mengembangkan lapangan pekerjaan bagi setiap masyarakat yang ada. Perencanaan strategi tersebut untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sering terjadi di Indonesia yaitu cepat tumbuhnya angkatan kerja tidak sebanding dengan perkembangan lapangan pekerjaan yang ada (Malik, 2013:34).

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting, sebab pemerataan tanpa pertumbuhan ekonomi berarti membagi atau merata kemiskinan, sedangkan pembangunan ekonomi adalah memeratakan kemakmuran dan akan terjadi apabila pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang harus meningkatkan kepastian maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap pertumbuhan dan pembangunan disektor industri yang bisa meningkatkan pendapatan nasional maupun daerah dan dapat menyerap tenaga kerja seiring pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat (Tambunan, 2001:23).

Pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional mencerminkan perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun atas seluruh wilayah nasional. Dalam skala yang lebih sempit (skala regional) pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung pada karakteristik serta kemampuan suatu wilayah/region dalam mengelola wilayahnya (Sjafrizal, 2008:86).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dan merupakan fenomena penting yang dialami oleh perekonomian seluruh dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu tolak

ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. pembangunan sektor ekonomi merupakan proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006:22).

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang juga memiliki kewenangan otonomi seperti kabupaten/kota lainnya untuk mengurus urusan pemerintah daerahnya. Pemerintah Kabupaten Gresik dituntut untuk kreatif dalam menyusun perencanaan daerah agar sesuai dengan mengembangkan potensi daerahnya, khususnya kemampuan menciptakan kesempatan kerja guna mencapai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini akan menjadi proses yang merupakan suatu tantangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menunjukkan potensi daerah yang belum optimal.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Gresik memerlukan tenaga kerja yang berkualitas untuk menjamin tingkat produktivitas yang tinggi dan dapat bersaing dengan yang lain. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, berkaitan erat dengan jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat pula. Jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja menandakan bahwa pembangunan di suatu daerah belum berjalan secara efektif sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah setempat.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam dunia kerja adalah bagaimana dapat menyerap sebesar-besarnya angkatan kerja yang ada dalam setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan peningkatan produktivitas pekerja secara keseluruhan. Sebab dengan meningkatnya produktivitas, diharapkan akan meningkatkan upah sehingga kesejahteraan tenaga kerja dapat diperbaiki. Proses pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer menuju sektor sekunder. Pergeseran pertumbuhan sektor produksi ini secara langsung juga akan berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja dari yang semula bermata pencaharian utama pada sektor pertanian, bergeser ke sektor industri, perdagangan dan jasa. Perubahan struktural tersebut juga memberikan dampak tidak langsung terhadap perubahan struktur ketenagakerjaannya.

Ketidakserasian antara perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, secara umum juga akan menimbulkan kelemahan pada sistem penawaran dan permintaan tenaga kerja. Menurut Tjiptoherijanto dalam Yuliarti (2006) Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah umum dan mendasar yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, antara lain terkait dengan masalah kesempatan kerja, tingkat upah yang rendah dan produktivitas yang rendah.

Upaya Pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan salah satunya dengan cara meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang akan

berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Ketersediaan lapangan kerja diharapkan akan meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah. Walaupun PDRB suatu daerah tinggi, jika tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal, tentu akan mengakibatkan beban ketergantungan yang tinggi bagi perekonomian (Kopsos, 2005:85). Lapangan kerja di Kabupaten Gresik juga tidak selamanya mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Sehingga pemerintah daerah perlu mencari jalan keluar agar tidak terjadi peningkatan pengangguran dengan cara memberdayakan masyarakat dengan memberikan modal untuk membuka usaha mandiri.

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik sangat besar dan kompleks. karena menyangkut ribuan jiwa tenaga kerja. Kompleks karena masalah tenaga kerja mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dirumuskan (Tobing, 2006).

Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik menurut data Badan Pusat Statitistik Kabupaten Gresik Tahun 2017 sebanyak 1.285.018 jiwa. Dengan luas wilayah 1.191,25 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 1.103 jiwa/km². Artinya tiap tiap km² di wilayah Kabupaten Gresik rata-rata telah ditempati penduduk sekitar 1.103 jiwa.

Dalam proses pembangunan, penduduk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat berdaya guna tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk maka pemerintah harus mampu menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data BPS, penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi menjadi dua yakni penduduk yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2017 jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 632.619 jiwa sedangkan penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 311.182 jiwa. Dari jumlah penduduk yang bekerja, sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri pengolahan sebanyak 176.923 jiwa, di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel sebanyak 161.877 jiwa. Sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 101.396 jiwa. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan 92.124 jiwa, di sektor konstruksi sebanyak 50.108 jiwa. Sektor angkutan, pergudangan, komunikasi sebanyak 25.592 jiwa. Sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan tanah dan jasa perusahaan sebanyak 18.477. Sektor listrik, gas, air sebanyak 4.839 dan yang terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 1.193 jiwa.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti menambah jumlah tenaga produktif dan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti makin besar ukuran pasar domestiknya. Namun demikian, pertumbuhan penduduk baik positif maupun negatif bagi pembangunan ekonomi tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, informasi mengenai kesempatan kerja secara sektoral sangat diperlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Dari uraian diatas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengukur pemerintahan dengan melihat seberapa mampukah pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya dari masing-masing sektor perekonomian yang ada. Penciptaan lapangan kerja yang tinggi akan memberikan manfaat pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat serta mengidentifikasi potensi sektor-sektor ekonomi sebagai pedoman dalam pengembangan sektor basis serta menganalisis lebih tentang seberapa besar kesempatan kerja tiap sektor basis yang ada. Keadaan tersebut yang melatarbelakangi penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Gresik dengan Pendekatan Pertumbuhan Sektor Basis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada sektor-sektor yang merupakan sektor basis yang memiliki kesempatan kerja lebih dari cukup dan penambahan kesempatan kerja total sebagai akibat adanya penambahan dari sektor basis ?
2. Apakah ada kesempatan kerja nyata di Kabupaten Gresik dalam periode 20013-2017 yang dipengaruhi oleh komponen laju pertumbuhan kesempatan kerja di Jawa Timur, komponen bauran industri dan komponen keunggulan kompetitif ?
3. Apakah ada kesempatan kerja non basis yang tersedia untuk setiap satu lapangan kerja di sektor basis ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sektor-sektor basis yaitu sektor yang memiliki kesempatan kerja lebih dari cukup dan mengetahui besarnya penambahan lapangan kerja total sebagai akibat dari adanya penambahan lapangan kerja di sektor basis.
2. Untuk mengetahui kesempatan kerja nyata di Kabupaten Gresik yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur, bauran industri, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki.
3. Untuk mengetahui banyaknya lapangan kerja non basis yang tersedia untuk setiap satu lapangan kerja di sektor basis.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka manfaat peneliti ini adalah :

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat diketahui perkembangan Sektor Basis dan Kesempatan Kerja yang tersedia di Kabupaten Gresik.
3. Bagi mahasiswa, Sebagai bahan Informasi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dan calon peneliti selanjutnya baik untuk penelaahan lebih lanjut maupun sebagai bahan perbandingan.
4. Bagi Pemerintah, Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi–instansi terkait dalam mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengembangan daerah.